

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah merencanakan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi bangsa tersebut.

Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan Daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan untuk

membayai pembangunan Daerahnya sesuai dengan prinsip Daerah otonomi (Septian, 2010).

Penyerahan urusan Pemerintahan dan pembangunan kepada Daerah Kabupaten/Kota disertai juga dengan penyerahan kewenangan kepada Daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Sumber-sumber pembiayaan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah. Di antara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari Daerahnya sendiri, sehingga Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari semua sektor antara lain sektor pariwisata.

Namun perkembangan pariwisata yang pesat selama dasa warsa terakhir ternyata tidak lepas dari efek negatif yang ditimbulkannya. Disamping kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang berarti dari segi ekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada segi ekonomi dan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup dan budaya masyarakat telah mengakibatkan terjadinya banyak

kerusakan berupa pencemaran lingkungan, budaya masyarakat, penggusuran, prostitusi.

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Gorontalo, dengan luas wilayah \pm 1.984,58 km². Permukaan wilayah Kabupaten Bone Bolango, terdiri dari kawasan pegunungan dan lautan. Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi obyek wisata alam yang unik, baik wisata alam darat maupun wisata alam laut.

Tabel 1-1

potensi obyek wisata alam

Nama Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata	Potensi Daya Tarik	Potensi Retribusi
-------------------	---------------------	--------------------	-------------------

A. WISATA ALAM			
1. Lombongo	Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa	Pemandian air panas, air dingin, dan air terjun	0,9 %
2. Danau Perintis dan Kawasan KIAT	Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa	Nilai historis perjuangan rakyat Gorontalo	-
3. Cekdam/bendungan Tapa	Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara	Air sungai yang dingin	-
4. Sumber panas bumi Desa Libungo/Desa Pancuran	Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan	Air panas	-
5. Puncak Meranti	Desa , Kecamatan Tapa	Pemandian untuk orang dewasa	-
6. Sungai-Tebing batu besar Bone Raya	Desa Tombulilatu, Kecamatan Bone Raya	dan anak-anak, dengan sumber air berasal dari air terjun Pemandangan tebing batu besar.	-
7. Air terjun Taludaa	Desa Taludaa , Kecamatan Bone	Air terjun dengan ketinggian sekitar 12 meter	-
8. Air Terjun Molutabu	Desa Molutabu Kecamatan Kabilabone	Memiliki kubangan kubangan dibawahnya	-
B. WISATA ALAM BAHARI :			
1. Taman bawah laut Olele	Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone	Taman bawah laut dengan sebutan "The Hidden paradise".	2,5 %
2. Pantai Botutunuo	Desa Botutunuo, Kecamatan Kabila Bone	Hamparan pantai pasir putih berbenteng batu karang	0,2%
3. Pantai Molutabu	Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone	Hamparan pasir pantai yang landai dan biota laut yang unik serta memiliki	-
4. Pantai Bulawa	Desa Kaidundu Barat dan desa Nyiur Pasir Putih, Kecamatan		-

C. WISATA SEJARAH/ZIARAH	Bulawa	pulau tenggelam Hampan pasir putih yang halus	
1. Taman Makam Pahlawan Nani Wartabone	Desa Bube, Kecamatan suwawa	Wisata Sejarah	-
2. Makam Hubulo di Kecamatan Tapa	Desa Dunggala, Kecamatan Tapa	Wisata Sejarah	-
3. Makam Raja Atinggola (Ti Bulonggodu)	Desa Dunggala, Kecamatan Tapa	Wisata Sejarah	-
4. Makam Manuli Sastrawan Lisan (Tanggomo)	Desa Popolu, Kecamatan Bulango Timur	Wisata Sejarah	-

Berbagai obyek wisata alam dan budaya tersebut merupakan sebagian dari potensi sumberdaya yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, maka pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya alam dan budaya tersebut merupakan upaya penting, dalam rangka meningkatkan pembangunan dan perekonomian Kabupaten Bone Bolango, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, 2013).

Agar segenap potensi obyek wisata tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimum terhadap perkembangan pembangunan dan perekonomian Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu dibuat suatu perencanaan yang terarah,terukur,terintegrasi,dan disertai dengan aturan Pemerintah yang jelas sebagaimana diatur dalam Perda 30 Tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi, karena kawasan obyek wisata alam merupakan bagian tidak terpisahkan dengan kawasan lain di sekitarnya. Selain itu, upaya pengembangan obyek dan sektor

pariwisata juga membutuhkan keterlibatan sektor lain, bahkan termasuk keterlibatan sektor swasta.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) merupakan suatu bentuk produk perencanaan yang dibuat oleh Daerah dalam kaitan dengan upaya pengembangan potensi pariwisata yang ada di Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, RIPPDA merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan Daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, 2013).

Sebagai salah satu daerah otonomi, Bone Bolango sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berusaha untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui sektor pariwisata. Karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi sektor pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi, dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

Namun sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum maksimal dalam membangun tempat wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango terutama dalam hal retribusi rekreasi, karena sampai sekarang yang mengelolah tempat-tempat wisata di Kabupaten Bone Bolango adalah masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut tanpa ada pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan akhirnya

sebagian retribusi tidak masuk ke kas daerah hanya sekitar 2,9% saja yang masuk kas daerah.

Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul :

“ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BONE BOLANGO”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya yaitu :

1. Sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango dalam hal kontribusi rekreasi masih tergolong rendah/belum sesuai harapan Pemerintah Daerah
2. Pengaruh sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango tidak memberikan dampak pada PAD secara maksimal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana perhatian Pemerintah dalam menunjang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bpone Bolango ?
3. Seberapa besar pengaruh sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis potensi PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango
2. Mengetahui dan menganalisis kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango
3. Mengetahui strategi yang dilakukan untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango mengenai strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango dalam rangka meningkatkan retribusi daerah
2. Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya pemerintah daerah kabupaten bone bolango) dalam pengambilan keputusan kebijakan di waktu akan datang.

